

EFEKTIVITAS PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Liana Ayu Pratiwi

(2216041141)

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yaitu masalah sosial yang ada pada masyarakat yang pada umumnya diartikan kemiskinan adalah gambaran dari sebuah kondisi dimana kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, dan papan dan ketidakadaan serta kepemilikan dan kurangnya pendapatan. Menurut Schiller (1979), kemiskinan yaitu ketidaksanggupan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dan barang barang yang mencukupi untuk memnuhi kebutuhan sosial yang terbatas, (Sutoyo, 2013:1). Menurut etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak mempunyai harta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mengartikan bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidup yang berada di kondisi dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang telah ada selama bertahun-tahun dari berbagai negara, khususnya Indonesia. Seperti yang ada pada Perpres No. 15 tahun 2010 menyatakan “bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat”. Di Indonesia angka kemiskinan per bulan September 2019 sebesar 24,79 juta atau 9,22% dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini. Sementara ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui program-program sosial dan ekonomi, tetapi masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Berbagai cara maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji diberbagai negara namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, seperti Indonesia telah berkembang berpuluh puluh tahun tetapi masih dihinggapai oleh masalah kemiskinan

dimana 14% rakyat Indonesia dari 240 juta jiwa yang artinya masi sekitar 30 juta rakyat Indonesia saat ini masih masuk kategori miskin dengan pendapatan 1\$ perharinya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat dalam beberapa taun terakhir ini tetapi masih belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang relevan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor rumah tangga ternyata masih tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan secara relevan dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional sehingga menjadi prioritas utama pembangunan dan perubahan. Selama ini pemerintah Indonesia telah memberikan banyak program-program sosial pengentasan kemiskinan. Ada beberapa strategi upaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu yang pertama, melindungi keluarga dan masyarakat miskin lainnya melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai aspek kebutuhan. Kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha untuk pencegahan kemiskinan yang akan datang lagi. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sifat kompleks masalah kemiskinan meminta kebijakan dan strategi penanggulangan yang integral, misalnya melalui program program perluasan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan manusia dan diberikannya kemudahan akses untuk berbagai peluang sosial ekonomi yang ada. Karena keterbatasan pemerintah, program pengentasan kemiskinan ataupun peraturan yang mengarah pada masalah kemiskinan membutuhkan skala prioritas. Kasus ini telah menjadi bahan perdebatan oleh pemerintah.

World Bank (2002) memiliki kategori karakteristik masyarakat miskin menurut wilayah, komunitas, individu maupun rumah tangga. Pada faktor komunitas, infrastruktur menjadi kunci utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat ikatannnya dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial, selain itu memudahkan para investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Infrastruktur pembangunan yang penting yaitu saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama untuk transportasi. menurut Sumodiningrat (1999) kemiskinan memiliki 3 kategori yaitu;

- 1) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi pada seseorang ataupun kelompok masyarakat tidak memiliki rasa ingin untuk memperbaiki kondisi hidupnya sampai ada yang memberikan bantuan untuk mendorong mereka keluar dari posisi tersebut.

- 2) Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diatas garis kemiskinan diantara jarak miskin dan non-miskin.
- 3) Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dimana pendapatannya di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan utamanya.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), melihat kemiskinan dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan kualitas manusia. Sisi pendapatan adalah kurangnya pendapatan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok. Dan dari sisi kualitas manusia adalah kekurangan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan non-pangan, seperti energi, pakaian, dan tempat tidur. Adapun beberapa tipe golongan kemiskinan lainnya seperti kemiskinan persisten, merupakan kemiskinan dimana situasi orang atau kelompok secara konsisten miskin untuk masa yang lumayan lama. Sedangkan kemiskinan transein merupakan kemiskinan dimana kehidupan seseorang atau kelompok jatuh dibawah garis kemiskinan apabila terjadi jatuh sakit, PHK, dan adanya peningkatan biaya pendidikan.

Menurut Harniati (2010) dalam bukunya (Bhinadi, 2017: 17-19). Adapun indikator tingkat kemiskinan yaitu :

1. Keterbatasan Pangan
2. Keterbatasan akses pendidikan
3. Keterbatasan akses pekerjaan
4. Keterbatasan akses kesehatan
5. Keterbatasan sumber daya alam
6. Besarnya beban penduduk

Menurut Syahyuti (2006: 95), ada 3 macam kondisi kelompok masyarakat miskin, yaitu:

1. Kelompok rentan (*vulnerable group*), adalah kelompok miskin yang dimana kehidupannya jauh lebih baik dari pada kelompok lainnya, tetapi mereka rentan terhadap segala perubahan sosial di sekitarnya.
2. Kelompok miskin (*poor*), adalah kelompok miskin yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki kesempatan terhadap pelayanan sosial.
3. Kelompok paling miskin (*destitute*), adalah kelompok yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak mempunyai sumber pendapatan, dan tidak memiliki kesempatan terhadap layanan sosial.

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun antusiasmenya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memecahkan 3 masalah utama yaitu pengangguran, distribusi, ketimpangan, pendapatan dan kemiskinan. Menurut Gunnar Adler Karlsson dalam Ala (1981: 31) strategi penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Strategi jangka pendek, dimana strategi ini menyalurkan berbagai sumberdaya kepada rakyat miskin dalam jumlah yang banyak.
2. Strategi jangka panjang, strategi ini memerlukan swadaya setempat dengan memperbaiki dan mencukupi biaya hidup secara individu dan sosial.

Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan menurut UU No. 25 Tahun 2000 seperti:

1. Pengembangan sistem jaminan sosial
2. Penyediaan kebutuhan pokok
3. Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin

Dalam Undang-Undang tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 5 ayat (1) poin a dinyatakan bahwa “Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin”. Salah satu tindakan untuk melanjutkan dari Prepres tersebut adalah dengan adanya SLRT (Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu) dan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan pelayanan secara utuh diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. SLRT dibangun untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat miskin atau prasejahtera. Awal diluncurkan pada tahun 2016 di Indonesia, SLRT berjumlah 50 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Pada tahun 2017-2019, SLRT menambah sebanyak 100 SLRT. Perkembangan SLRT mengalami penambahan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Saat ini SLRT sebanyak 150 di kabupaten/kota yang akan terus didukung perkembangannya hingga mencapai target yaitu 514 SLRT pada tahun 2024 mendatang. Dalam kebijakannya, SLRT di tingkat pemerintahan desa/kelurahan didirikan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).

Dalam hasil penelitian Sulhan (2017) tentang kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Kartu Jaminan Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada masyarakat, salah satunya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan tindakan pemantauan kembali terhadap kelayakan para penerima bantuan sosial. Salah satu nya yaitu dilakukannya survey silang warga miskin

yang terdaftar agar informasi yang didapatkan benar-benar valid agar masyarakat layak mendapatkannya.

Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan pada garis kemiskinan 4,35% dan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,10 poin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan penduduk miskin Provinsi Lampung dapat mengimbangi kenaikan garis kemiskinan. Namun demikian, berdasarkan data BPS kota Bandar Lampung pada tahun (2022) Maret berada pada level 514.039 perkapita perbulan atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Kepala BPS Lampung menyampaikan bahwa angka kemiskinan Lampung mengalami penurunan menjadi 11,57% dibandingkan dengan sebelumnya.

Upaya dan cara penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang diatur dalam UU. No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut, pelaksanaan program kesejahteraan sosial adalah upaya yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara, yang meliputi jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Sehingga terbentuknya pelayanan kesejahteraan sosial berbasis penanggulangan kemiskinan menjadi perlindungan utama bagi pemerintah.

Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk melengkapi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berlandaskan data sistematis adalah Pusat Kesejahteraan Sosial. Dalam program tersebut salah satu media yang menggerakkan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Puskesmas. Upaya yang dilakukan ini diharapkan bisa memperbaiki penghasilan dengan jaminan dan bantuan finansial seperti BSP, KIS, PKH, KIP, dan RLTH. Bantuan bagi keluarga miskin, perancangan seperti itu bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi serta mendapatkan standar hidup minimal.

Puskesmas adalah lembaga yang dibentuk oleh aparat desa/kelurahan yang bertujuan untuk memudahkan warga miskin mencapai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik dijalankan oleh pemerintah negeri dan swasta. Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dari 10,96% tahun 2014 menjadi 7-9% di tahun 2019. Salah satu dari bentuk pelaksanaan tersebut yaitu meningkatkan kecepatan dan ketetapan pencapaian masyarakat miskin untuk bisa mengakses lebih banyak program-program penanggulangan kemiskinan. Puskesmas dijalankan dengan landasan azas kepada kesetaraan,

keberlanjutan, responsivitas, kerahasiaan, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan kesetiakawanan. Puskesmas juga memiliki tujuan adapun tujuan Puskesmas didirikan yakni:

1. Memberikan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin yang terpadu
2. Menjadi pusat informasi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
3. Membantu mencari tahu keluhan masyarakat miskin dan memantau penanganan masalah tersebut
4. Menyediakan data terbaru bagi OPD (Organisasi Perangkat Desa) terkait warga miskin
5. Melakukan pembaruan data terkait warga miskin

Program Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk melindungi individu dan keluarga dari resiko ekonomi dan sosial. terutama mereka yang rentan atau membutuhkan dukungan. Program ini merupakan komponen penting dalam upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Dengan perencanaan yang baik, implementasi yang efisien, dan evaluasi yang berkelanjutan, program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari program ini untuk mengurangi ketidaksetaraan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, melindungi hak-hak sosial, dan menciptakan kesetaraan sosial. Program Kesejahteraan Sosial dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau organisasi nirlaba. Pemerintah tersebut mempekerjakan staff, menyusun kebijakan, dan mengelola distribusi manfaat.

Di Indonesia, terdapat berbagai program kesejahteraan sosial yang dikelola oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Beberapa program kesejahteraan sosial yang umum di Indonesia yaitu:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program kesejahteraan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan ke pendidikan dan kesehatan. PKH ini juga memiliki tujuan yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan meningkatkan akses kesehatan. PKH ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang ketat oleh pemerintah. Keluarga-keluarga ini dianggap memenuhi syarat untuk menerima

bantuan. Bentuk bantuan yang diberikan dalam PKH yaitu dalam bentuk tunai, yang jumlahnya bervariasi tergantung pada kriteria dan kebutuhan keluarga penerima biasanya diberikan secara berkala. Program ini diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat dan bahwa tujuan program tercapai. Seiring berjalannya waktu program ini telah mengalami perubahan dan perbaikan untuk lebih baik untuk mencapai tujuannya.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan memiliki akses terhadap pangan cukup dan berkualitas. BPNT merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sasaran utama dari BPNT adalah keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam basis data Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diberikannya dalam bentuk tambahan dana yang bisa digunakan untuk membeli produk pangan pokok lainnya.

3. Program Asuransi Kesehatan Nasional

Program asuransi kesehatan nasional adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk suatu negara. Program ini berfokus pada penyediaan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang dapat diakses oleh semua warga negara tanpa memandang status ekonomi.

4. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT adalah sebuah program sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk dana tunai. Tujuan utama dalam program ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau terdampak oleh berbagai faktor, seperti krisis ekonomi dan bencana alam. Program ini merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan sosial pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan secara ekonomi.

5. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

PAMSIMAS ini adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan di Indonesia terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Program ini didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

PAMSIMAS ini bukti nyata dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan, meningkatkan akses terhadap sumber daya penting seperti air bersih, dan memberdayakan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam hal ini program berupaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia.

6. Kartu Indonesia Pintar

KIP adalah program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik. Program ini salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan inklusif dan merata serta mengatasi masalah ketidakmampuan finansial dalam mengakses kepentingan.

7. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Jamsostek adalah program penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan pekerja formal di suatu negara. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan finansial dan perlindungan sosial bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja lebih tenang dan mendapatkan manfaat dari kontribusi mereka selama bekerja.

8. Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial merupakan program yang berusaha membantu individu yang mengalami masalah sosial untuk memperoleh kembali stabilitas hidup mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi anggota yang lebih produktif dalam masyarakat. Sukses program rehabilitasi sosial sering kali memerlukan kerjasama antara sektor pemerintah, non pemerintah, serta dukungan masyarakat yang luas.

9. Program Bedah Rumah

Program bedah rumah merupakan program salah satu yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki atau membangun ulang rumah yang rusak atau tidak layak huni. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan keamanan tempat tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu atau terdampak oleh bencana alam atau faktor lainnya.

10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)

PEM adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, mengembangkan usaha, dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Program ini fokus pada pemberian

pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola usaha, mengakses pasar, dan menciptakan peluang ekonomi.

B. Rumusan Masalah

- Apakah program kesejahteraan sosial yang ada di Bandar Lampung efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut?
- Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program kesejahteraan sosial dalam mengatasi kemiskinan di kota Bandar Lampung?

C. Tujuan penelitian

- Mengevaluasi efektivitas program kesejahteraan sosial yang telah diterapkan di kota Bandar Lampung dalam mengurangi kemiskinan.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program kesejahteraan sosial dalam mengatasi kemiskinan di kota Bandar Lampung.
- Memberikan saran perbaikan atau perubahan program kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan dampak positifnya terhadap mengurangi kemiskinan.

D. Manfaat penelitian

- Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana program kesejahteraan sosial saat ini berhasil dalam mengurangi kemiskinan di kota Bandar Lampung
- Membantu pemerintah dan organisasi terkait dalam mengambil langkah-langkah lebih efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan di kota Bandar Lampung
- Memberikan wawasan kepada pemerintah kepentingan terkait dengan faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam perancangan dan implementasi program-program kesejahteraan sosial

Daftar pustaka

- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114-132.
- Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 162-170.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.
- Rohman, A., Sukiman, A., & Trihardianto, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(1), 71-84.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.